



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 920/III/VIII/2016

**Perlu Evaluasi Efektivitas  
Program Pengentasan Kemiskinan**

**Ketua DPR RI Terima  
DPP Serikat Islam Indonesia**

**Kualitas Keamanan, Tolak Ukur  
Keberhasilan Penegakan Hukum**



**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan

# Perlu Evaluasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan yang selama dilaksanakan oleh Pemerintah perlu mendapat evaluasi terkait efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan masyarakat. Pasalnya, walaupun anggaran besar sudah digelontorkan, namun dirasa belum mampu mengentaskan kemiskinan.

**D**emikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (1/8). Apalagi, usai meninjau langsung lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Besusu Timur, Kota Palu, Sulteng, pihaknya menemukan beberapa keluarga yang telah mendapatkan bantuan selama 4 tahun, namun tidak mengalami peningkatan taraf hidup. Bahkan Sodik menilai, rumah keluarga itu pun dalam kondisi tak layak huni.

"Terkait hal ini, sering kami tanyakan kepada Menteri Sosial. Harus ada evaluasi dari program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah sudah memberikan dana miliaran untuk sekian ribu Kepala Keluarga (KK), namun perlu ditinjau ulang bagaimana efektivitas penggelontoran anggaran tersebut," tegas Sodik.

Politisi F-Gerindra itu menilai, selain belum adanya evaluasi, efektivitas program pengentasan kemiskinan ini dipertanyakan keberhasilannya karena lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga.

"Ada program dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya. Tapi lemah koordinasinya. Sehingga kita khawatirkan efektivitasnya rendah. Programnya banyak, dan anggaran pun mencapai triliunan, tetapi belum mampu mengentaskan kemiskinan," imbuhnya.

Sodik pun menambahkan, Program Keluarga Harapan atau program pengentasan kemiskinan lainnya, kerap mendapatkan protes dari masyarakat, karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Sehingga, data kemiskinan harus benar-benar valid.

"Ada yang miskin tidak mendapat bantuan, malah yang tidak miskin mendapat bantuan," heran politisi asal dapil Jawa Barat. Untuk itu, pihaknya telah mendukung Kementerian Sosial dengan memberikan alokasi anggaran, untuk memverifikasi dan memvalidasi data dengan melibatkan peranan RT, RW dan Kelurahan setempat. Mengingat, aparat desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mengetahui kemiskinan.

"Itu juga bisa yang menyebabkan efektivitas pengentasan kemiskinan menjadi rendah, karena bantuan tidak tepat sasaran.

Selain terkait belum adanya evaluasi dan minimnya koordinasi antar kementerian dan lembaga," simpul Sodik.

Sementara itu, saat pertemuan dengan Gubernur dan Gubernur Sulawesi Tengah serta jajaran SKPD Pemprov Sulteng, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq (F-PKB) pun miris melihat kondisi lokasi keluarga yang mendapat bantuan PKH di Palu, Sulteng. Menurut politisi F-PKB itu, dibalik

megahnya Kota Palu, masih ada titik-titik kemiskinan, yang harus segera dibantu.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu meminta kepada Pemerintah Provinsi, untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai komoditas, dimana ada oknum yang menjadikan orang miskin menjadi obyek proyek.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, Ambo Daleng mengatakan, bantuan PKH diberikan

kepada keluarga miskin di Palu dari tahun 2012, dan akan berakhir pada 2018 mendatang. Ia meminta agar bantuan lebih bersifat ke ekonomi produktif.

"Saya mohon kepada Komisi VIII DPR RI, bantuan ini perlu dibekali bantuan yang sifatnya ekonomi produktif, misalnya KUBE. Sehingga, ketika bantuan tunai itu selesai, maka masyarakat miskin yang telah mendapat bantuan PKH ini, dapat melanjutkan kegiatan ekonomi, sehingga dapat menghidupi dirinya dan keluarganya," kata Ambo.

Kunjungan kerja ini diikuti juga oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang (F-PDI Perjuangan, dapil Sulawesi Selatan), Elion Numberi (F-PG, dapil Papua), Ruskati Ali Baal (F-Gerindra, dapil Sulawesi Barat), Khatibul Umam Wiranu (FPD, dapil Jawa Tengah), Desy Ratnasari (F-PAN, dapil Jawa Barat), Yudi Kotouky (F-PKS, dapil Papua), dan Achmad Mustaqim (F-PPP, dapil Jawa Tengah).

Dalam kesempatan meninjau lokasi keluarga penerima PKH, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sembako dari Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial. Tim Komisi VIII DPR RI juga meninjau MAN Insan Cendekia Kota Palu, BPBD Sulteng, dan P2TP2A Sulteng. ■



Tim Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi PKH

## DPR RI Dukung Kebijakan Dan Kerjasama Dengan Ukraina

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan kehormatan Presiden Ukraina H.E. Mr. Petro Poroshenko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum'at (5/8). Pada kesempatan itu, Ade Komarudin menyatakan bahwa DPR RI mendukung kebijakan pemerintah Ukraina dalam menjaga kedaulatan dan teritorialnya, serta meningkatkan kerjasama perdagangan antar kedua Negara.

“Parlemen Indonesia mendukung kebijakan pemerintah, yang selalu menopang perjuangan pemerintah dan rakyat Ukraina untuk menjaga kedaulatan dan teritorialnya yang sekarang ini sedang berkonflik dengan Rusia,” ujar Ade Komarudin.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan berbagai kerjasama terutama di bidang alutsista. Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI banyak membeli alutsista dari Ukraina, tetapi selama ini hanya melalui pihak ketiga. Oleh karena itu DPR RI ingin agar langsung berurusan dengan pemerintah Ukraina, tidak melalui pihak ketiga, supaya bisa mendapatkan harga yang kompetitif dan lebih bagus.

"DPR RI akan terus mendukung kebijakan TNI bila ingin mengambil alutsista dari Ukraina sesuai dengan kebutuhan yang ada, asalkan ada komitmen tidak melalui pihak ketiga tetapi secara langsung, maka secara bertahap ada alih teknologi dari pemerintah Ukraina," ucapnya.

Pembahasan lain yang juga mengemuka yakni mengenai kerjasama



Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Presiden Ukraina

tentang food security (ketahanan pangan). Ukraina dan Indonesia masing-masing memiliki lahan yang cukup luas, jadi perlu ada kerjasama untuk saling mengembangkan agar ketahanan pangan dapat tercipta kembali di Indonesia, dan

beberapa potensi teknologi juga turut dikerjasamakan.

Kita juga membicarakan potensi kerjasama sumber daya mineral, dimana Ukraina dan Indonesia sama-sama memiliki potensi yang cukup, oleh sebab itu pasar masing-masing negara akan dibuka. Kita selama ini selalu mengeksport sawit dan beberapa komoditas lainnya, dan Ukraina merupakan pasar yang cukup besar bagi sawit, karet, dan lain sebagainya hasil komoditas kita. Tentu kerjasama yang baik sangat penting, agar ditengah melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dimana harga komoditas juga turun, kita memerlukan pasar yang luas seperti Negara Ukraina tersebut.

"Kami telah sepakat, bahwa DPR RI akan selalu mendukung penuh kerjasama antara Indonesia dengan Ukraina agar dimasa yang akan datang lebih ditingkatkan lagi," pungkas pria yang akrab disapa Akom tersebut. ■

(dep), foto: rumi/hr

BULETIN  
PARLEMENTARIA



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL** **KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs.Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Ariandinya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusanantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]

## Ketua DPR RI Terima DPP Serikat Islam Indonesia

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Islam Indonesia (SII) dipimpin Muhammad M. Ibrahim di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/8).

Dalam kunjungannya Serikat Islam bermaksud mengundang Ketua DPR RI untuk hadir dalam acara 'memperingati 100 tahun pidato dari salah satu tokoh SI yaitu Hadji Oemar Said Tjokroaminoto yang mencanangkan agar negeri ini



Ketua DPR RI Ade Komarudin berfoto bersama DPP Serikat Islam Indonesia

memiliki pemerintahan sendiri'.

"Akan dibuat acara Peringatan Pidato terkait dibentuknya pemerintah sendiri yang ke 100 tahun. Ini bagus untuk mengenang sejarah, tapi tanpa kaderisasi acara seperti ini tentu maknanya akan hilang. Maka penting adalah kaderisasi," tegas Akom sapaan akrab Ade Komarudin.

Lebih lanjut Akom, menjelaskan bahwa Tjokroaminoto merupakan tokoh yang sangat besar di republik ini, dengan kaderisasinya melahirkan para pimpinan yang cukup berpengaruh antar lain Bung

Karno. Ia sampaikan kalau ideologi dari Tjokroaminoto mau ditransfer ke masyarakat perlu dilakukan kaderisasi yang baik dari DPP SI.

Legislator Partai Golkar ini menekankan yang paling penting adalah adanya kaderisasi. "Karena kalau tidak ada kaderisasi tidak mungkin pemikiran besar dan perjuangan Tjokroaminoto akan terus langgeng di mata generasi sekarang," tambah Akom.

Di tempat yang sama, Muhammad M. Ibrahim menyampaikan undangan kepada

Ketua DPR RI untuk menghadiri acara puncak Peringatan 100 tahun Deklarasi yang pertama kali dicanangkan oleh salah satu tokoh Serikat Islam Tjokroaminoto pada saat nasional kongres pertama di Gedung Merdeka Bandung pada tanggal 17 Juni 1916 lalu.

"Beliau yang pertama kali mengumandangkan secara tidak langsung ke masyarakat. Beliau merupakan guru ideologis, sehingga ada keterkaitan antara Proklamasi 17 Agustus dan Proklamasi pertama kali pada saat 17 juni 1916 yang dikumandangkan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Tahun ini adalah 100 tahun kita memperingati acara penting sebagai tonggak awal kemerdekaan bangsa dan rakyat Indonesia. Kita mau coba untuk melakukan refleksi sejenak," ujarnya menambahkan. ■

(rnm/npf), foto: rani/br.

## Fadli Zon Tanggapi Cat Baru Kompleks DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi soal cat baru Gedung DPR RI/MPR RI yang mendapat protes dari masyarakat, karena identik dengan taman hiburan. Protes itu datang salah satunya dari seorang arsitek DPR RI yaitu Utomo Brodjonegoro.

“ Saya ditelepon oleh beliau setelah melihat gambar-gambar yang sudah menjadi bahan berita dan beliau menyampaikan sebaiknya dikembalikan ke keadaan semula, agar mempresentasikan gedung parlemen bukan taman hiburan,” ujar Legislator Fraksi Gerindra di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (8/8).

Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa kritikan dari Utomo sebagai seorang arsitek yang ikut mendesain gedung DPR RI juga

perlu didengarkan agar gedung parlemen mempresentasikan dengan warna yang sesuai tentu tidak dengan menggunakan warna-warna yang justru akan membuka kritik.

Atas protes tersebut, Fadli meminta agar warna cat dikembalikan ke semula dan tidak merubah suatu filosofi.

"Jadi, meski bisa dianggap pemborosan dengan mengecat kembali, itu tidak masalah asal tidak seperti taman hiburan.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Mengingat ini lembaga negara, Inikan gedung parlemen tidak bisa kemudian warna-warnanya itu seperti warna di tempat hiburan. Jadi kritikan itu juga perlu diperhatikan agar tidak merubah filosofi," tambahnya. ■

(rnm/npf), foto: rani/br.

## DPR RI Jangan Hanya Diam, Beri Saran Solutif

Menyinggung rencana pemotongan anggaran sebesar Rp133 triliun yang akan dilakukan pemerintah dalam APBN P 2016, DPR RI diharapkan jangan hanya berdiam diri menerima kenyataan pemotongan tersebut. Harus ada saran yang bersifat solutif disampaikan kepada pemerintah.

**K**etua DPR RI Ade Komarudin menyatakan hal tersebut di Media Center, Jumat (5/8), dalam bincang bersama para wartawan. Parlemen diimbau agar memahami situasi yang tidak nyaman ini. "Semua harus memahami ini termasuk DPR RI. Saatnya mengencangkan ikat pinggang," ujarnya.

Akom, demikian sapaan akrab Ketua DPR RI, berharap agar target pengampunan pajak yang mencapai Rp165 triliun bisa tercapai, sehingga angka pertumbuhan bisa terus terjaga, bahkan meningkat. Dengan demikian, pemotongan anggaran tidak terlalu tinggi dilakukan. Di sisi lain, pemberdayaan BUMN juga perlu dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara.

"BUMN harus dimaksimalkan untuk tingkatkan pertumbuhan. Bila angka pertumbuhan naik 5% saja sudah bagus, walau pemerintah menargetkan sampai



Ketua DPR RI Ade Komarudin

6%," kilah Akom. Saat ini, lanjut Akom, pemerintah sudah membentuk tim untuk menganalisis pos mana saja yang terkena pemotongan anggaran. Semua kementerian/lembaga pasti terkena pemotongan, termasuk DPR RI yang

pernah dipotong hingga Rp500 miliar.

Pemerintah, memang sudah memilih opsi pemotongan anggaran untuk menstabilkan postur anggaran negara. Semua ini tentu agar tak terjadi defisit yang terlalu dalam, karena bila defisit terjadi hingga 3% berarti sudah melanggar UU. Untuk itu, semua komisi di DPR RI dan mitra kerjanya akan membahas rencana pemotongan anggaran ini secara mendalam.

Yang jelas, lanjut Akom, situasi perekonomian terakhir ini tidak akan menimbulkan krisis serius seperti dialami pada 1998 lalu. Untuk menstabilkan ekonomi perlu menyetabilkan terlebih dahulu kondisi politik di Tanah Air. "Stabilitas politik harus dijaga sebagai faktor utama untuk stabilitas ekonomi," papar Akom. ■

(mb) foto: anief/br

## Komisi IV DPR RI Apresiasi Bulog Aceh

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengapresiasi langkah bulog dalam menyerap gabah masyarakat di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau gedung Bulog divre Aceh, Senin (1/8).

“ Menurut penjelasan kepala Bulog disini (Divre Aceh) bahwa Bulog sudah melakukan sergab (serap gabah) langsung dari seluruh petani dengan harga yang normal. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan kehidupan para petani, sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh,” ungkap Viva Yoga.

Sayangnya, lanjut politisi dari Fraksi PAN ini, pihaknya juga mengkritisi bahwa cadangan beras yang ada di gudang bulog tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Melainkan juga berasal dari negara lain

seperti Thailand dan Vietnam. Padahal diakui Direktur Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh

bahwa produksi beras Aceh bisa dikatakan over production atau produksi berlebih.

"Seharusnya produksi beras Aceh itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri terlebih dahulu, baru setelah itu dikirim ke daerah lain. Tapi



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Aceh

tidak masalah karena Bulog Aceh juga mendapatkan beras impor dari Thailand dan Vietnam. Intinya cadangan beras di Bulog sebesar 1500 ton bisa mencukupi kebutuhan daerah ini," pungkasnya. ■

(Ayu) Foto: ayu/br

# Nunukan Bisa Kembangkan Hortikultura

Kabupaten Nunukan bisa mengembangkan tanaman hortikultura yang selama mengalami ketergantungan kepada Malaysia. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron disela-sela memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI ke Kalimantan Utara, Senin (8/8).

**M**enurut Herman, di Kaltara khususnya Kabupaten Nunukan banyak hamparan khususnya untuk tanaman beras, jagung serta tanaman sagu dan aren yang bisa dimanfaatkan ke depan." Ini merupakan potensi optimal sehingga saya sepakat bersama Bupati Nunukan untuk mengembangkan sektor agrobisnis ini menjadi unggulan di Nunukan," ujarnya.

Ia menekankan, jangan sampai kebutuhan pokok selalu tergantung kepada Malaysia, justru harus memberi kontribusi kepada masyarakat Nunukan dan di sisi lain dapat menjual hasil komoditas ke Malaysia.

Selain mengembangkan hortikultura, potensi provinsi ini cukup banyak termasuk wisata alam. Kebetulan Komisi IV DPR RI sedang merevisi UU Karantina dan

sudah mendiskusikan agar daerah-daerah perbatasan diberi kebijakan khusus. Karena persoalannya hampir sama, biasanya berbatasan dengan negara lain yang lebih maju sementara di negara kita di pelosok desa. Tetapi Herman mendorong daerah perbatasan harus mengembangkan sektor lain yang juga berpotensi besar.

"Saya yakin Nunukan akan mampu berkompetisi apa yang ada sekarang dengan Malaysia," katanya dengan menambahkan bahwa masalah karantina dan bea cukai akan dibicarakan dengan negara tetangga itu sehingga bawa manfaat khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. ■



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron bersama Bupati Nunukan

(mp). Foto: Mastur/ed

## Komisi VIII Desak Pemkot Palangkaraya Selesaikan Pembangunan MAN IC

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dimana Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) sedang dalam proses pembangunan dan mangkrak sejak 2014 karena sengketa tanah tersebut.

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mengatakan terkait masalah sengketa tanah ini sebenarnya hanyalah soal komunikasi yang kurang baik. Dia menjelaskan karena sebenarnya ini adalah program baik dan juga untuk kebaikan masyarakat setempat yang dibuat Pemerintah Daerah (Pemda).

"Saya minta masyarakat mempercayakan masalah ini kepada Pemda, Terkait uang ganti rugi sebenarnya walikota bukannya tidak ingin memberikan tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan uang jika tidak ada bukti surat kepemilikan dari masyarakat setempat yang mengaku pemiliki tanah yang sedang dibangun MAN IC tersebut," ujar politisi F-PKB Senin (1/8) di Palangkaraya.



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau MAN IC Palangkaraya

Di tempat yang sama Walikota Palangkaraya, Riban Satia mengatakan sebelum proyek MAN IC tersebut dibangun, tidak ada pihak yang mengatakan atau mengakui bahwa lahan seluas 45 hektar tersebut milik warga setempat, atau dengan kata lain itu milik

negara. Kemudian pada saat proyek tersebut sedang berlangsung tiba-tiba ada pihak-pihak tertentu yang mengakui bahwa itu tanah milik masyarakat.

"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk penyelesaian masalah ini, namun sampai sekarang belum ada titik temu. Sudah lama kami minta surat kepemilikan tanah dari warga setempat tapi bukti kepemilikan tersebut belum juga ditunjukkan", ujar Riban.

"Saya sudah ketemu dengan tokoh setempat, bagaimana menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan yang ada, tetapi saya minta kepada mereka untuk bersabar dan proses pembangunan ini tetap berjalan," tambahnya. ■

(emo,mp), foto : kreano/br.

## Komisi IX Temukan Banyak Buruh Asing Di Papua Barat

Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Papua Barat terjawab sudah saat perwakilan dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disduknakertrans) Provinsi Papua Barat mengakui keberadaan TKA yang saat ini masih bekerja di PT. SDIC Papua Cement Indonesia (PT.SPCI) atau disebut juga pabrik Semen Maruni, Distrik Manokwari Selatan. Namun demikian, pihak Disduknakertrans menjelaskan bahwa para TKA tersebut telah memenuhi peraturan tentang ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan menyayangkan masih banyaknya TKA terutama dari negara Tiongkok yang bekerja di pabrik Semen Maruni. Apalagi menurutnya jenis pekerjaan para TKA tersebut sebenarnya bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal.

"Komisi IX sangat menaruh perhatian terkait maraknya TKA yang masuk ke negara kita, sementara masyarakat kita sendiri masih membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Karena itulah Komisi IX membentuk Panja TKA untuk melakukan pengawasan," ungkap politisi Partai Demokrat ini saat kunjungan kerja ke Papua Barat belum lama ini.

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV ini juga melihat masih lemahnya fungsi pengawasan khususnya di Kementerian Tenaga Kerja, dan juga kerja sama lintas sektoral antara Kemenaker, Kemenlu dan Imigrasi dalam membendung arus TKA terutama dari Tiongkok. "Mereka sepertinya kurang koordinasi dan terkesan masih mengedepankan ego sektoral dan saling lempar tanggung jawab," sergah Ayub Khan.

Ayub menambahkan, salah satu sebab lemahnya pengawasan karena Sumber Daya Manusia (SDM) di pengawasan TKA ini masih kurang, seharusnya ini perlu dianggarkan, apalagi ini terkait kebijakan bebas visa bagi 135 negara yang digulirkan pemerintah. Kebijakan tersebut sudah seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat dengan personil lebih banyak lagi. Sebelum kebijakan bebas visa saja kita sudah banyak kecolongan apalagi

sekarang, tentu dengan peningkatan anggaran dan SDMnya.

Hal senada disuarakan Anggota Komisi



*Tim Kunker Komisi IX dipimpin Dede Yusuf Macan Effendi saat berdialog dengan Mitra Kerja di Sorong, Papua Barat*

IX DPR RI Djoni Rolindrawan, para TKA yang bekerja di pabrik semen mencapai 300-700 orang bisa saja mereka masuk secara resmi (legal) dengan melalui ijin, namun dirinya yakin proses dalam memperoleh ijin itu pasti ada yang dilanggar.

"Contohnya dulu ada ketentuan harus bisa berbahasa Indonesia yang akhirnya direvisi oleh pemerintah. Lalu mengenai jabatan atau jenis pekerjaan, jika ada 300-700 TKA yang membangun pabrik semen saya yakin di situ pasti masuk juga buruh-buruh kasar, padahal aturan resminya hanya jabatan-jabatan tertentu yang bisa diisi TKA dengan harapan juga akan terjadi alih teknologi (pertukaran skill), ada juga pembatasan dengan perbandingan misal 1:10," urai politisi Hanura ini.

Politisi asal Dapil Jabar III ini menganggap keliru jika mendefinisikan investor itu datang bawa uang lalu membuka usaha di sini sebagai PMA (Penanaman Modal Asing). Kasus di Bayah Banten perusahaan semen Merah Putih itu milik BUMN dengan dukungan pembiayaan 75% dari kredit Bank BUMN.

Mereka mentenderkan pembangunan pabrik semen itu secara internasional lalu pemenangnya perusahaan asal China dan mereka datang dengan membawa para pekerjanya, dengan dalih para buruh Tiongkok tersebut bisa bekerja lebih cepat, disiplin dan tepat waktu ketimbang buruh lokal. Dan ini sama persis yang terjadi di Papua Barat yaitu pembangunan pabrik semen Maruni (PT. SPCI) yang sistem proyeknya kurang lebih sama.

Perwakilan Disnaker Papua Barat menjelaskan bahwa manajemen pabrik Semen Maruni mendatangkan tenaga asing terkait pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu cepat karena bangunannya spesifikasi anti gempa untuk jangka waktu panjang.

Jika pengerjaan konstruksi bangunan selesai pasti tenaga kerja lokal akan lebih banyak dipekerjakan pihak manajemen pabrik Semen Maruni, mungkin di bagian produksinya saja ada tenaga khusus. Kalau tenaga kerja konstruksi yang ada sekarang akan pulang.

Baik Ayub maupun Djoni, keduanya sepakat bahwa penggunaan TKA dalam berbagai proyek infrastruktur harus dengan pengawasan ketat dari Kementerian terkait. Hal tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, utamanya kecemburuan sosial bagi masyarakat sekitar proyek yang seharusnya menikmati dampak terbukanya lapangan kerja.

"Karena kita negara hukum dan memiliki beberapa persyaratan yang tidak mudah terkait TKA. Taati saja sesuai aturan yang berlaku," pungkas Djoni. ■

## Kualitas Keamanan, Tolak Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI Raden Muhammad Syafi'i menyatakan harus ada komitmen yang jelas dari pemerintah dalam menegakkan hukum di negeri ini, sebab keberhasilan sebuah penegakkan hukum itu dibuktikan dengan kualitas keamanan dan ketertiban yang tercipta di dalam lingkungan masyarakat.

“Penegakan hukum bukan ditandai dengan jumlah penangkapan dan barang haram yang disita, tetapi tegaknya hukum akan ditandai dengan semakin berkualitasnya keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ucapnya saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komisi III DPR RI, Senin (1/8).

Menurutnya, paparan yang telah disampaikan oleh beberapa mitra kerja Komisi III di Kalsel, masih bersifat klasik. Sebab masih melaporkan tentang berapa banyak perkara yang bisa diselesaikan, berapa banyak orang yang sudah ditangkap, atau berapa kilogram narkotika yang bisa disita, dan lain sebagainya.

“Tujuan dibentuknya aparat penegak hukum adalah untuk tegaknya hukum, yang ditandai dengan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kalau dengan data penangkapan atau barang haram yang disita, tetapi kejahatan tidak semakin reda, berarti ada sesuatu yang salah. Aparat kita hanya selalu menangani akibat dari suatu sebab, tidak



Anggota Komisi III DPR RI Raden Muhammad Syafi'i

pernah kemudian menyusuri bagaimana agar akibat itu tidak terulang lagi,” tandasnya.

Penyebab masalah itu terus terulang adalah tidak ditelusuri darimana sebenarnya sumber kejahatan, dan tidak teridentifikasi dengan jelas mengenai aparat hukum yang menangani persoalan-persoalan itu. Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa lingkungan penegakan hukum di Indonesia sudah

terkontaminasi.

“Bukannya serius dalam menanganani penegakan hukum, tetapi malah mereka menjadi bagian dari sumber terjadinya pelanggaran hukum. Maka kita harapkan ke depan harus ada keberanian dari Presiden, Pimpinan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kapolri untuk membuat *standard operating procedure* (SOP) sebuah penanganan kejahatan agar tuntas sampai ke akhirnya,” ucap Politisi F-Gerindra tersebut.

Ia juga menghimbau kepada pemerintah, agar dalam rekrutmen calon aparat penegak hukum itu harus dilakukan dengan seleksi yang benar. Hal ini dimaksudkan agar tercipta aparat penegak hukum yang bertanggungjawab dalam melakukan tugasnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk kepentingan dirinya atau orang lain. ■

(dep.npr) Foto: Ryan/mr

## Kaltara Perlu Tambah Pengamanan dan Anggaran

Provinsi Kalimantan Utara sangat memerlukan tambahan pengamanan dan anggaran, guna mengatasi berbagai kerawanan khususnya penyelundupan. Provinsi baru yang terdiri beberapa Kabupaten ini berbatasan langsung baik darat maupun perairan dengan Malaysia dan Philipina yang sangat rawan terhadap gangguan keamanan, penyelundupan, perdagangan ilegal, pencurian kayu dan rawan masuknya narkoba. Bahkan banyak terjadi kasus *trafficking* (perdagangan manusia) serta ancaman terorisme seperti penculikan awak kapal WNI oleh Abu Sayyaf.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dan anggota Tim Luther Kombong usai melakukan kunker ke Nunukan dan Tarakan, Kaltara, Senin hingga Selasa (8-9/8). Karena itu, kata Herman, seluruh masyarakat masyarakat di wilayah itu harus meningkatkan kewaspadaan.

Kuncinya kalau masyarakat sejahtera semua tercukupi oleh produksi pangan lokal dan pendapatan cukup untuk menghidupi keluarganya, keamanan akan terjamin. Untuk penyelundupan harus mengefektifkan semua aparat di perbatasan baik bea cukai, imigrasi maupun karantina.

"Khusus berkaitan dengan revisi UU Karantina, DPR RI akan mengusulkan, nantinya karantina bisa ditempatkan di garis terdepan, sehingga bisa menyeleksi berbagai komoditas perdagangan yang masuk ke Indonesia," tegasnya

Hal yang sama dikatakan, Luther Kombong bahwa Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Philipina sehingga sangat rawan terjadinya penyelundupan. "Karena itu saya berharap Bupati secara intensif meminta tambahan pengamanan dan dana dari pusat agar keamanan di daerah itu diperketat. Nunukan dengan Pulau Sebatik adalah salah satu pintu gerbang masuk ke Indonesia, kalau pengamanannya lemah maka akan berdampak pada keamanan



Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

secara keseluruhan wilayah NKRI," kata Kombong yang dalam kunjungan ke Pulau Sebatik didampingi Bupati Nunukan Asmin Hafid Laura.

Politisi Gerindra ini menambahkan, penjajah Belanda dulu masuk ke Indonesia lewat Tarakan. Kasus-kasus penyelundupan yang sering terjadi akhir-akhir ini lewat Nunukan (Pulau Sebatik) dan Tarakan.

Selengkapnya Tim Kunker Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron adalah Wakil Ketua Komisi Siti Hediati Soeharto (FPG) didampingi Yadi Sri Mulyadi dan Made Urip (FPDIP), Saniatul Lativa (FPG), Luther Kombong dan Sjahrani Mataja (F.Gerindra), Vivi Sumanti Jayabaya (FPD), Jamaluddin (FPAN), Acep Adang Ruhiat, Taufiq Abdullah (FPKB), Andi Akmal Pasludin (FPKS) dan Kasriah (FPP). ■

(mp) Foto: Mastur'od

## Komisi V Minta Instrumen Landing System Bandara Husen Sastranegara Dipenuhi

Tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI dipimpin langsung oleh Ketuaanya Fary Djemy Francis (F-Gerindra) melakukan kunjungan kerja ke bandar udara international Husein Sastranegara, didampingi Direktur Pelayanan Bandara Ituk Herarindri, Senin (1/8).

Dalam kesempatan ini Fary Djemy Francis meminta agar kelengkapan instrumen *landing system* dipenuhi, karena cuaca dan situasi slot penerbangan yang masih padat baik penerbangan sipil maupun penerbangan militer.

"Saya kira ini menjadi catatan penting kami dan kami akan sampaikan ke Kementerian Perhubungan," katanya.

Dia juga berharap kepada mitra kerja agar akses jalan menuju bandara perlu dipikirkan kembali, karna jalan menuju Bandara Husein Sastranegara sering kali macet, dan juga akses parkir yang harus di kembangkan kembali. Pasalnya Komisi V sering kali mendapat laporan keterlambatan penerbangan akibat kemacetan menuju bandara tersebut.

Di sela-sela kunjungan kerjanya, Pimpinan Komisi V ini menyempatkan diri berbincang dengan pengguna jasa



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis

transportasi udara di bandara tersebut dan menyebutkan bahwa apabila dibandingkan dengan sebelumnya, bandara di kota Bandung ini sudah cukup baik dalam pelayanannya.

"Tinggal nanti kita diskusi dengan maskapai penerbangan jangan sampai nanti ada penundaan penerbangan yang cukup lama sehingga pengguna jasa transportasi udara merasa tidak nyaman. Karena

terkadang cuaca yang buruk dan slot penerbangan yang padat membuat keterlambatan penerbangan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut politisi dari Dapil NTT II ini memberikan apresiasi kepada Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Husein Sastranegara dalam mewujudkan bandara itu menjadi Bandara International. "Saya cukup senang dan menyampaikan apresiasi karena sangat luar biasa perubahannya," ungkap Fary.

"Harapan kami semua, khususnya Komisi V DPR RI kepada mitra kerjanya baik pihak Angkasa Pura, PT KAI, dan Kementerian Perhubungan agar rencana pembangunan bandara Kertajati nanti bisa berbagi peran. Apa yang harus dilayani di Bandara Husein Sastranegara dan apa yang akan menjadi pelayanan di Kertajati," katanya menambahkan. ■

(azka/mp) foto: Azka/mr.

## Sutan Adil: Mendikbud Jangan Merampas Hak Bermain Anak-anak

Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy terkait sekolah sehari penuh atau Full Day School (FDS) di tingkat pendidikan dasar, yakni SD dan SMP ternyata menuai pro dan kontra. Gelombang penolakan pun datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.

“Belum selesai kita membenahi masalah kurikulum yang kerap kali di acak-acak, sekarang muncul gagasan untuk anak sekolah sehari penuh, hanya dengan alasan pendidikan dasar saat ini tidak siap menghadapi perubahan zaman,” tegas Sutan, ketika dihubungi via telepon oleh Parlemen, Rabu (10/8).

Politisi F-Gerindra itu mengingatkan Mendikbud untuk mengkaji ulang ide sekolah sehari penuh ini. Ia meminta, perlu ada pertimbangan terhadap hak bermain anak-anak, agar jangan dirampas oleh kebijakan yang prematur.

"Saya minta implementasi sistem ini harus di dahului dengan kajian yang utuh, jangan parsial dan prematur seperti sekarang. Pikirkan juga peran orang tua jika kebijakan ini jadi diterapkan, termasuk masalah dukungan anggaran dan sarana prasarana dari perubahan ini," kritisi Sutan.

Sutan menambahkan, jika kebijakan ini diterapkan, akan mengurangi interaksi anak dengan orang tuanya, termasuk waktu untuk mengaji yang biasanya dilaksanakan pada sore hari. Ia juga khawatir, kebijakan ini akan membebani orang tua karena harus memberi uang saku lebih kepada anak, mengingat, tidak semua orang tua dikategorikan mampu.

"Bagaimana dengan konsumsi anak saat siang atau sore hari, apakah orang tua bisa selalu memberikan uang saku lebih atau bekal. Kita juga tahu, banyak anak sekarang yang tidak sarapan pagi karena orang tuanya kurang mampu," prihatin Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini pun memberi contoh, sistem pendidikan di negara maju justru memberi ruang bagi



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

anak-anak untuk bermain mengembangkan kreativitas dan imajinasi masa kecilnya.

"Finlandia saja yang dianggap memiliki sistem pendidikan dasar terbaik di dunia jam sekolah saja hanya sekitar 5 jam tanpa harus di bebani tugas yang menyiksa peserta didik," imbuhnya.

Untuk itu, sebagai mitra kerja dari Kemendikbud, Sutan meminta agar Mendikbud mengkaji secara mendalam dan menyeluruh mengenai gagasan ini. Apalagi, Sutan juga mendapat aspirasi dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan di Jambi terkait gagasan yang sudah disampaikan Mendikbud kepada Wakil Presiden ini.

"Pada intinya mereka meminta pemerintah memikirkan lagi rencana ini secara utuh dan mendalam. Suara dari akademisi dan praktisi ini pada dasarnya ingin melindungi hak anak untuk bermain di usia perkembangan mereka," tutup politisi yang akrab dipanggil SAH ini.

Menteri Muhadjir Effendy sebelumnya, seperti dikutip dari beberapa media, menyampaikan gagasan *full day school* untuk pendidikan dasar yaitu SD

dan SMP untuk sekolah negeri dan swasta. Gagasan ini diajukan agar anak memiliki kegiatan di sekolah dibanding berada sendirian di rumah ketika orang tua masih bekerja.

"Dengan sistem *full day school* ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi 'liar' di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, menambah waktu anak di sekolah membuat siswa bisa menyelesaikan tugas dan mengaji hingga dijemput orang tua usai jam kerja.

Namun, setelah menuai protes dan polemik dari berbagai kalangan masyarakat, gagasan itu akhirnya dibatalkan. ■

Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara tahun ini menyiapkan lahan seluas 250 ha, yang akan digunakan untuk penanaman jagung sebagai bantuan dari Kementerian Pertanian. Ini terungkap saat pertemuan Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Daniel Johan yang didampingi 17 orang anggota dewan dengan petani di kelurahan Togafo, Pulau Ternate. Senin (1/8).

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengatakan, proyek tanaman jagung nantinya akan disebarkan ke para petani di semua kecamatan di Kota Ternate. Selain

## DPR RI Apresiasi Pembangunan Bandar Deli oleh Pelindo I

Komisi VI DPR RI mengapresiasi berbagai upaya Pelindo I dalam membangun pelabuhan penumpang di kawasan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. "Bersyukur diberi kesempatan untuk melihat bahwa wajah pelabuhan kita sekarang berbeda dengan dahulu, bahwa sekarang pelabuhan kita menjadi cantik, bersih, dan kita sudah memaanusiakan penumpang" tutur Ketua Komisi VI Teguh Juwarno setelah melakukan inspeksi ke Terminal Bandar Deli Belawan, Rabu (3/8).

Pimpinan Komisi dari Fraksi PAN ini juga mengapresiasi lengkapnya fasilitas di Terminal Bandar Deli sebagai upaya pelayanan prima PT Pelindo 1 yang merupakan BUMN kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

Tim Kunker Komisi VI DPR RI RI dalam kesempatan kunker ini menyimak pemaparan kinerja PT Pelindo 1 (Persero) dan rencana serta progres pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang berada di PT Pelindo 1, yang dipaparkan oleh Direktur Utama Bambang Eka Cahyana.

Menanggapi pemaparan tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjidredja juga memberikan penilaian

positif. Menurutnya kinerja dari Pelindo I sudah sesuai target. "Dilihat dari kinerja dengan nominal rasio pendapatan yang memperoleh keuntungan lebih banyak, maka dapat disimpulkan produktivitas dan efisiensi di Pelindo 1 bagus," ujar Lili disambut tepuk tangan hadirin.

Melihat kinerja dan progres pengembangan pelabuhan tersebut, Tim Kunker Komisi VI sangat mendukung PT Pelindo 1 agar tidak berhenti berpuas diri, terus mengembangkan melaksanakan program-program pengembangan di pelabuhan Belawan, Sumatera Utara ini. ■



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

## Malut Akan Kembangkan Tanaman Jagung Seluas 250 HA

lahan perlu juga disiapkan petani selaku pengelola dan nantinya jagung yang akan dihasilkan petani akan dibeli Bulog. Hal ini diakui langsung oleh Kepala Bulog, Najamuddin saat ditanya Wakil Ketua Komisi Daniel Johan mengenai persetujuan Bulog untuk membeli hasil panen dari para petani.

"Kami dari Bulog siap membeli hasil panen jagung. Ternate memiliki gudang dengan kapasitas 1 sampai 2 ton dan Kalbar 8 ribu ton. Bulog siap untuk menampung hasil panen jagung yang diproduksi di Maluku Utara," kata Najamuddin saat temu wicara dihadapan petani di Kelurahan Togafo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate Abdillah



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

untuk kesiapannya mengaku baru sampai pada tingkat penyiapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Menurutnya, bantuan dari Kementerian terkait dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi ekonomi petani pasca El-nino yang berdampak dimana ribuan pohon milik petani mati.

Dalam kesempatan ini, Tim Komisi IV DPR RI melakukan tanya jawab dengan para petani. Sejumlah permasalahan petani di Kota Ternate yang diungkapkan diantaranya petani cengkik yang mengeluhkan tentang alat pengering cengkik yang sangat dibutuhkan, sebab sering mengalami kerugian saat panen yang berbarengan dengan musim hujan, sehingga cengkik cepat busuk.

Selain itu, mesin pencacah rumput, rumah kompos dan pelatihan pemasaran yang hingga kini masih sangat minim. Mendengar keluhan dari petani, anggota DPR RI berjanji menyampaikan aspirasi dan keluhan para petani tersebut ke pusat. Sesuai temu wicara Tim Komisi IV melakukan peninjauan ke lokasi pembibitan tanaman cengkik. ■

## Komisi X DPR RI Apresiasi Sektor Pendidikan di Provinsi Kaltara

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Mujib Rohmat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi baru namun sudah mampu memberikan kemajuan-kemajuan terutama dalam sektor pendidikan.

“ Kami (DPR RI) jujur harus memberikan apresiasi kepada Kaltara , sebuah provinsi baru yang pergerakannya luar biasa. Pertama, dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh gubernur yang tingkat kesulitannya luar biasa karena daerahnya itu daerah air, lalu kemudian luas sekali. Saya lihat ada kemajuan- yang luar biasa, dan tentunya kami (DPR RI) memberikan apresiasi," kata Mujib Rohmat kepada Parlemen usai melakukan pertemuan Komisi X DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan jajaran SKPD Pemprov Kaltara, Senin (1/8) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Mujib Rohmat yang memimpin rombongan Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltara

itu mengatakan, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi DPR RI, terus memperhatikan semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan regulasi terutama dengan regulasi yang menyangkut soal pendidikan, yang mana regulasi itu harus memperhatikan daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil).

Khusus mengenai Provinsi Kaltara, menurut Mujib Rohmat, Pemprov Kaltara harus terus meningkatkan daya perannya meski sebagai provinsi baru. "Kaltara ini kan daerah baru, saya kira komunikasi perlu diperbaiki lagi, sehingga Kalimantan Utara menjadi bagian dari kedaulatan negara yang harus mendapatkan perhatian yang sama dengan provinsi-provinsi yang lain," ujarnya.

Terkait adanya perbedaan data guru antara pusat dengan data yang ada di Pemprov Kaltara, Mujib Rohmat

menilai persoalan ini tidak hanya terjadi di Kaltara saja, daerah-daerah yang sudah maju seperti di Pulau Jawa juga sering menemukan persoalan seperti ini. Misalnya, di dalam neraca kementerian dianggapnya sudah memenuhi, tetapi di lapangan kadang masih ditemukan

Rohmat juga memuji Pemprov Kaltara yang memperoleh WTP dari BPK. "WTP ini saya kira luar biasa, daerah baru yang SDM-nya baru, ini pertanda bahwa peningkatan SDM-nya cukup baik, pemahaman mereka terhadap pengelolaan anggaran juga cukup baik," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X DPR RI, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengungkapkan bahwa Provinsi Kaltara kekurangan sekitar lima ribuan guru baru.

"Guru ini masih sangat kurang mulai dari SD sampai SMA, apalagi ditambah guru yang pensiun, paling tidak kita butuh lima ribu guru baru,

Nunukan saja perlu dua ribu, namun formasi yang diberikan hanya 50 pertahun," terang Irianto.

Dalam kesempatan ini, Irianto pun mengatakan, bahwa Provinsi Kaltara juga melakukan pemberian insentif kepada guru baik yang PNS maupun tidak sebesar Rp500.000/bulannya.

"Guru disini agak lumayan, didaerah lain tidak dapat, termasuk guru Paud kita beri. Ini adalah bentuk perhatian kita kepada guru," ujarnya.

Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kaltara yang dipimpin Mujib Rohmat, juga dihadiri sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, seperti Bambang Sutrisno (F-PG), Muslim (F-PD), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), Zainul Arifin Noor (F-PKB), Dony Ahmad Munir (F-PPP), Dadang Rusdiana (F-Hanura). ■



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau SMPN 2 Tarakan

kabupaten-kabupaten yang sebenarnya masih membutuhkan guru, karena guru yang meninggal, pensiun atau pindah tempat kadang tidak termonitor dengan baik oleh data di kementerian.

"Kita berharap harus terus di update sehingga dengan demikian riil kita ingin mengatakan jangan sampai daerah kekurangan guru dan itu efeknya besar sekali kepada kecerdasan masyarakat Indonesia," tegasnya.

Untuk itu pemerintah pusat, kata Mujib Rohmat, harus selalu melakukan update terhadap data-data itu dan kalau bisa pemerintah pusat harus turun betul ke daerah untuk cek secara fisik. "Sebenarnya kalau BPS melakukan pendataan cek fisik ke daerah, tidak hanya mendapatkan masukan-masukan yang asal bapak senang, budaya-budaya seperti ini harus dihentikan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Mujib

## Dharma Wanita Setjen DPR RI Beri Bantuan Pada Pensiunan Setjen DPR RI

Dharma Wanita Setjen DPR RI memberikan bantuan pinjaman dana para pensiunan pegawai Setjen DPR RI untuk kegiatan wirausaha seperti berdagang atau memiliki keterampilan serta kerajinan.

**H**al ini diungkapkan Ketua Dharma Wanita Setjen DPR RI Ida Johnson usai menghadiri acara arisan rutin di Ruang Pansus Gedung DPR RI, Jumat (5/8).

Dalam kesempatan ini Ida Johnson menjelaskan, bantuan ini diberikan untuk para pensiunan, karyawan, serta isteri pensiunan DPR RI.

"Dharma Wanita mempunyai dana kas sejumlah uang dari hasil usaha kantin, *souvenir* dan pendidikan," katanya.

Menurutnya, adanya pinjaman diharapkan para pensiunan tidak harus meminjam dana ke bank dengan beberapa aturan. Namun pinjaman tersebut ada persyaratan khusus yaitu pensiunan boleh



Foto bersama para pengurus dan anggota Dharma Wanita Setjen DPR RI

meminjam dana bila aktif di dalam arisan Dharma Wanita di rumah atau tempat tinggalnya.

Adapun sanksi yang akan dikenakan dalam peminjaman dana ini, apabila usahanya tidak maju ataupun tidak bergerak maka dana yang sudah di pinjamkan akan ditarik kembali.

Sebanyak 200 orang anggota Dharma Wanita saat ini terdiri dari Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), isteri pensiunan karyawan dan karyawan yang masih aktif.

Selain pemberian pinjaman dana, Ida Johnson juga memberikan terobosan baru yaitu akan berkunjung melakukan aksi sosial, yang selama ini hanya kepada

yatim piatu saja, Dharma Wanita akan melihat langsung keluarga yang benar-benar tidak mampu dan tidak mempunyai usaha. "Kami menghimbau kepada ibu-ibu anggota Dharma Wanita di sekitar kita agar melihat kondisi siapa yang benar-benar harus dibantu secara materi," tambahnya. ■

(mly,mp), foto: setju/br

## Idris Laena Dorong Tingkatkan Kesejahteraan Petani Karet dan Sawit Lewat Hilirisasi

Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi mendorong kebijakan hilirisasi dan industrialisasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani karet dan sawit di Provinsi Jambi. Hal itu diungkapkan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jambi Zumi Zola di Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Senin, (1/8).

**D**orongan tersebut diawali dari satu masukan yang diterima dari masyarakat tentang kesejahteraan petani karet dan sawit yang masih minim. Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa Indonesia tidak bisa paksakan karet produksi Indonesia untuk di ekspor, jadi memang harus ada industrialisasi dan hilirisasi.

"Ini kan persoalan klasik ya, artinya memang harus ada industrialisasi dan hilirisasi, kita tak bisa paksakan karet kita di ekspor," terangnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, Idris menjelaskan bahwa diperlukan kluster-kluster industri yang dibangun pemerintah untuk bisa menaruh produksi petani. "Dan bukan hanya karet, termasuk sawit. Sawit itu yang kita serap ke dalam negeri hanya beberapa persen. Selebihnya kita ekspor," sambungnya.

Menjadi persoalan di saat ekspor luar negeri terganggu, maka barang-barang ekspor tersebut harganya akan jauh menjadi lebih murah. "Soal minimnya kesejahteraan



Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena

petani sawit dan karet, saya kira persoalannya sama. Kita harus segera dorong industrialisasi dan hilirisasi. Sehingga kita bisa menyerap 50% dari hasil produksi petani kita," ujar anggota DPR RI dapil Riau II ini.

Dengan begitu, maka kesejahteraan petani menurutnya akan semakin membaik secara perlahan. Demikian yang dipaparkan dalam rapat di Komisi VI dengan mitra kerja terkait dalam masa sidang yang akan datang. ■

(bs,mp), foto: Hendra/br

## Malut Minta Perhatian Pemerintah

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) minta perhatian serius pemerintah pusat soal keadilan pembangunan, terutama di bidang energi dan pertambangan. Pemprov Malut tak banyak menikmati kekayaan alamnya.

Demikian terungkap dalam pertemuan delegasi Komisi VI DPR RI dengan Pemprov Malut, di Kota Sofifi, Senin (1/8). Wakil Gubernur Malut M. Natsir Thaib dan SKPD setempat, mengungkapkan, ada PT. Antam, BUMN yang menguasai eksplorasi pertambangan di Halmahera Timur Malut. Tapi, Pemprov Malut tak banyak mendapat bagian dari kekayaannya sendiri.

Terbukti anggaran daerah Malut terus berkurang dari Rp2,258 triliun pada 2015, kini tinggal sekitar Rp1 triliun lebih. Padahal kebutuhan pembangunan Malut cukup tinggi, apalagi berbatasan dengan negara lain. Penguasaan tambang oleh Antam dinilai tak membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.



Tim Kunker Komisi VI DPR RI memberikan cenderamata kepada Wakil Gubernur Maluku Utara

Yang ada justru masyarakat banyak terparap penyakit dari polusi tambang.

Ini menjadi keprihatinan tim kunjungan kerja Komisi VI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Komisi VI terus mendalami temuan ini.

per liter.

Hadir delegasi Komisi VI yang mendengarkan keluh kesah keprihatinan Pemprov Malut ini, Bambang Haryo Soekartono, Nyat Kadir, Adisatrya Suryo Sulisto, Dwie Arum Hadiatie, Andriyanto Johan Syah, dan Nur Hasan Zaidi. ■

Pembangunan smelter oleh Antam juga jalan di tempat. Padahal, Antam sudah mendapat PMN Rp3 triliun lebih.

Di bidang energi, terungkap bahwa Malut hanya menerima suplai solar dari Sulawesi Utara dan Jawa timur. Pajaknya diambil oleh dua provinsi penyuplai. Inilah yang mengakibatkan harga solar di Malut cukup mahal, yaitu Rp10 ribu

## RSUP Adam Malik Perlu Tingkatkan Tenaga Medis dan Fasilitas

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengarahkan agar RSUP H. Adam Malik Medan bisa mencari solusi peningkatan fasilitas layanan medis. Menurutnya rumah sakit ini adalah pusat rujukan dari beberapa rumah sakit yang ada di provinsi Sumatera Utara, sehingga sulit menghindar dari tanggungjawab pelayanan masyarakat.

“Jadi tentu pemenuhan fasilitas layanan medis perlu ditingkatkan. Kenapa, karena ini rumah sakit yang sangat dinamis, menampung banyak pasien. Dia menjadi sentral dari rujukan-rujukan rumah sakit di daerah-daerah. Kalau rumah sakit daerah tidak mampu pasti dilarikannya ke sini,” ujar Saleh sesaat setelah melakukan kunjungan langsung di RS Adam Malik Medan, Rabu (3/8).

Setelah Saleh berkeliling dan

melakukan pemantauan serta menanyakan keluhan-keluhan yang ada, di rumah sakit Adam Malik Medan, dia berkesimpulan secara umum tenaga medis masih kurang. Rumah sakit ini membutuhkan dokter tambahan, dengan begitu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Keluhan-keluhannya kan tentang tenaga medis yang kurang, untuk perawat saja masih butuh sampai 350 orang. Padahal tenaga kerja di situ sudah lebih 2ribu orang.

Dan kalau dilihat dari sirkulasi pasien, untuk rawat jalan saja untuk sebulan 25ribu orang,” ungkap Anggota Dewan dari dapil Sumut II.

Politisi PAN ini juga, melihat beberapa kendala dari sisi obat-obatan, ia mengatakan, “kelihatannya kebutuhan obat-obatan sudah dipenuhi sedemikian rupa tapi kadang-kadang kesulitan untuk mendapat pasokan, karena itu harus dipastikan distributor-distributor resmi yang masuk ke rumah sakit ini. Dan pemesanan rumah sakit dari jauh-

## Perlu Konsultasi Publik Sebelum Bahas RUU Kamnas

RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang sudah masuk daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2016 masih menyisakan kontroversi, baik secara prosedural maupun substansial. Perlu konsultasi publik untuk melihat urgensi pembahasan RUU ini.

**D**emikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Selasa (9/8). Konsultasi publik melibatkan b a n y a k

Kementerian dan lembaga selain juga parlemen. Se jauh mana RUU ini jadi kebutuhan nasional, padahal saat yang sama sudah banyak UU sektoral yang mengatur semua elemen dan kepentingan Kamnas.

RUU ini, kata politisi PPP tersebut, tidak tepat bila diinisiasi DPR RI, karena merupakan kebutuhan pemerintah seperti juga UU Pengampunan Pajak. "Jadi pertanyaannya, bila Kemenhan mendatangi DPR RI untuk dibuatkan UU Kamnas. Yang tepat, Kemenhan datang dulu

Kemenkumham, apakah sudah mendesak RUU dibahas," kilah Asrul.

Asrul pesimis, RUU ini bisa rampung tahun 2016, mengingat PR pembahasan RUU yang masuk Prolegnas begitu banyak. Komisi III sendiri belum rampung membahas RUU KUHP dan RUU Jabatan Hakim. Bila kelak ditambah RUU Kamnas, maka akan menambah daftar tunggu pembahasan, apalagi RUU ini masih penuh dengan kepentingan dan kontroversi. Perdebatannya akan memakan waktu panjang.

Asrul juga menduga ada wacana memasukkan peran TNI ke dalam Tupoksi Polri di bidang keamanan. Dan secara kebetulan, DPR RI juga sedang membahas RUU Pemberantasan Terorisme. Ada muatan kepentingan yang sangat kuat dalam RUU Kamnas. Menurut Asrul, TNI hanya bisa masuk ke wilayah keamanan bila sudah menyangkut kedaulatan negara, keamanan Presiden dan keluarganya, serta ancaman yang ditujukan ke KBRI di luar negeri.

Pembicara lainnya Al Araf Direktur Imparsial berpendapat, tata kelola Kamnas sebetulnya sudah banyak diatur dalam UU. Dan DPR RI tak perlu sibuk menginisiasi RUU tersebut. RUU ini, tandasnya, tidak dibutuhkan dan tidak urgen. Apalagi, ada wacana membentuk Dewan Keamanan dalam RUU Kamnas yang bisa mematikan proses demokratisasi di Indonesia.

Dewan Keamanan ini akan menjelma seperti Kopkamtib di era Orde Baru. Kebebasan berserikat dan berpendapat bisa diberantas dengan alasan keamanan. "RUU ini bisa menghidupkan Kopkamtib yang sangat refresif seperti di masa Orde Baru," ungkap Asrul. ■



Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani



Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau RS Adam Malik, Medan

dibanding-kan dengan rumah sakit besar lain m a s i h ketinggalan. " K a l a u dibanding-kan dengan rumah sakit lain ini masih kurang lah. Terutama masih agak sumpek, masih b a n y a k masyarakat yang duduk tidak teratur, ini perlu ditertibkan.

(eko/mp), foto : eko/br.

jauh hari harus jelas."

Saleh juga menyinggung soal fasilitas, menurutnya kalau RSUP H. Adam Malik

Rumah sakit itu kan harus dibuat nyaman," tuntas Saleh. ■

## Komisi II Ingin PKPU Selaras dengan UU

Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji menginginkan agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) selaras dan memiliki ruh yang sama dengan UU. Hal itu disampaikan disela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (9/8).

“ Yang penting adalah bagaimana PKPU itu benar-benar sesuai dengan ruh dan isi dari UU. Jangan sampai ada yang melenceng sedikitpun,” ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, dengan dilakukan RDP di saat reses ini Komisi II bisa mengoreksi PKPU yang telah diterbitkan KPU. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

harapkan bisa dikoreksi dan diproses. Misalnya saja soal kartu tanda penduduk, itu harus dieksplicitkan yakni e-KTP. Karena kita ingin ke depan itu proses pemilu itu berbasis pada e-KTP,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, KPU baru saja membuat aturan tanpa konsultasi



Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji

dengan DPR RI. Padahal perintah UU No 10 tahun 2016 mengatakan bahwa PKPU dapat dibuat setelah KPU berkonsultasi dengan DPR RI.

Tiga PKPU yang merupakan turunan UU No 10 Tahun 2016 adalah PKPU terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2017, PKPU Pencalonan, dan PKPU Pilkada di daerah khusus, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Sirmadji pun akan terus mengingatkan KPU agar dapat membuat aturan yang sesuai dengan UU. "Supaya PKPU benar-benar klop dengan ruh UU. Kita akan terus ingatkan mana yang kurang klop dan seterusnya," pungkasnya. ■

(by) fotomandirifree

## Irtama Minta Pejabat dan Pegawai Setjen DPR RI Isi Kuesioner Survey dengan Jujur

Dalam rangka melengkapi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian Dewan (BKD), Setjen DPR RI melakukan kuesioner survey tentang Kelembagaan Setjen dan BKD, Budaya Organisasi, dan Reformasi Birokrasi. Dalam sambutannya, di gedung DPR RI, Selasa (9/8), Inspektur Utama Setyanta Nugraha meminta agar para pejabat dan pegawai Setjen mengisi survey dengan jujur dan juga memahami survey itu.

“ Kami berharap para pejabat dan pegawai dapat mengisi survey dengan jujur, dan juga memahami dari survey ini. Karena survey ini sudah disusun sedemikian rupa, sehingga kalau teman-teman mengisi dengan seadanya atau semaunya sendiri, maka hal itu akan ketahuan. Karena didalamnya juga mengandung pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya menguji konsistensi dari jawaban,” ujar Setyanta Nugraha.

Ia juga mengatakan, kalau kuesioner survey diisi dengan pemahaman yang baik



Suasana pertemuan sejumlah pejabat Setjen DPR RI dan Pegawai

dan dengan kejujuran, maka akan mendapatkan hasil yang dapat ditindaklanjuti dengan *treatment* atau kebijakan-kebijakan yang sesuai.

"Kalau survey ini diibaratkan sebagai sebuah alat diagnostik, bila diagnostiknya benar maka obat yang diberikan juga akan tepat. Tetapi kalau diagnostiknya salah atau tidak benar, maka obatnya juga akan salah. Oleh

karena itu, penting bagi teman-teman semua untuk secara serius mengisi survey ini, karena survey ini juga mencerminkan seluruh unit kerja dari eselon I, II, III dan jabatan fungsional tertentu," tegasnya.

Menurutnya, tujuan dilakukan survey tersebut adalah untuk mengetahui sejumlah persepsi dari para pejabat dan pegawai dilingkungan Setjen dan BKD

terhadap kapasitas organisasi yang telah mengalami restrukturisasi. Sehingga akan diketahui bagaimana pandangan dari para pejabat dan pegawai tersebut, apakah organisasinya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sudah berdasarkan fungsi-fungsi yang tepat, serta sudah bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih. ■

(dep)/fotografi/ivc

## Badan Keahlian Dewan Terima DPRD Nganjuk

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Kabupaten Nganjuk di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senin, (8/8). Kunjungan ini dilakukan untuk berkonsultasi mengenai mekanisme perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

“ Kita memberikan masukan tentang perubahan Tata Tertib, bahwa Tatib itu bisa dilakukan perubahan manakala memang ada kebutuhan yang mendesak,” ungkap Johnson usai menerima DPRD Kabupaten Nganjuk.

Ia menjelaskan, DPRD kabupaten Nganjuk meminta masukan mengenai beberapa poin penting yang akan dimasukkan kedalam perubahan Tatib DPRD Nganjuk, antara lain terkait dengan program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), perubahan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan Kedisiplinan anggota.

Menurut Johnson, perubahan tatib sah saja untuk dilakukan apabila ada kebutuhan yang nyata dan mendesak. Sebagaimana yang dilakukan disini, lanjutnya, tetap saja bisa dilakukan perubahan atau pergantian terhadap pimpinan AKD jika memang diperlukan.

"Jangan sampai kita memahami karena sudah ditetapkan satu tahun maka tidak boleh dilakukan pergantian," katanya.

Kemudian, berkenaan dengan kedisiplinan anggota dewan apakah boleh dimasukkan ke dalam peraturan Tatib. Johnson menanggapi, hal itu boleh

dilakukan karena kehadiran anggota berkaitan dalam pelaksanaan tugasnya.

"Tugas anggota itu kan salah satunya mengikuti rapat-rapat, sehingga diperlukannya ketentuan

tertib sehingga bisa terlihat usaha setiap anggota untuk memperjuangkan program konstituennya.

"Ini akan kita jadikan sebagai masukan terkait penyelenggaraan kegiatan atau tugas pelaksanaan fungsi dewan. Apakah di komisi atau pansus untuk melakukan perubahan pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ini," imbuh Johnson.

Sementara itu, Ketua Pansus 1 DPRD Kab. Nganjuk Ratna Wulandari menyampaikannya keinginannya agar melalui perubahan Tatib, pihaknya mempunyai kewenangan lebih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Aspirasi kita di masyarakat jarang terakomodir oleh eksekutif, jadi ga bisa masuk ke RKPD, ga bisa masuk APBD juga. Itu yang menjadi kendala kami saat berhadapan langsung dengan konstituen," ungkap Ratna. ■

(amr), foto: jayadi/br



Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk

kehadiran. Ini perlu diatur supaya ada mekanisme yang bisa diikuti anggota. Tidak hanya itu, ini juga menyangkut bagaimana anggota memperjuangkan daerah pemilihannya," jelasnya.

Meskipun, lanjutnya, terkadang banyak ditemui kesulitan dari sisi perencanaan. Namun, tetap bisa dilakukan proseduralnya melalui tata

## Delegasi DPR RI Hadiri Sidang APA di Pakistan

Delegasi DPR RI menghadiri Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development, di Islamabad, Pakistan 25-29 Juli 2016 lalu. Sidang tersebut dihadiri oleh 22 dari 42 negara anggota. Delegasi DPR RI terdiri dari Tjatur Sapto Edy (F-PAN) dan Hamdhani (F.P.Nasdem).

**S**idang tersebut membahas 6 (enam) rancangan resolusi di bidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, yakni: (1) Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth; (2) Resolution on the Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in



Delegasi DPR RI saat mengikuti sidang APA di Pakistan

Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals; (3) Resolution on Asian Integrated Energy Market; (4) Resolution on Environmental Issues; (5) Resolution on Poverty Eradication dan (6) Resolution on Water and Sanitation in Asia for All.

Berdasarkan rilis yang diterima Bagian

Media Cetak Jumat (5/8), Delegasi Indonesia, secara aktif berpartisipasi dalam diskusi sehingga berhasil memasukkan 14 paragraf usulan, yang mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia, ke dalam rancangan-rancangan resolusi. Rancangan resolusi itu mengenai isu energi, lingkungan hidup, SDGs, stabilisasi keuangan dan

pengentasan kemiskinan.

Di sela-sela menghadiri sidang APA, Delegasi DPR RI juga melakukan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Islamabad dan sekitarnya yang umumnya adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di International Islamic University Islamabad (IIUI). Dalam kesempatan tersebut, sejumlah mahasiswa mengharapkan dukungan DPR RI diantaranya pemberian beasiswa.

Sidang akhirnya menyepakati 6 (enam) rancangan resolusi tersebut diatas yang akan dibawa dan diadopsi pada Sidang Pleno ke-9, yang rencananya

diselenggarakan pada tanggal 27 November - 2 Desember 2016 di Siam Reap, Kamboja.

APA merupakan forum antar Parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. ■

(bksap.mp), foto: dok- bksap dpr/ir.

## Didik Mukrianto: Lembaga Peradilan Harus Ciptakan Peradilan yang Agung

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan pada jajaran Kehakiman bahwa kehadiran lembaga ini untuk menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan di negeri ini.

“ Peradilan ini harus betul-betul mewujudkan apa yang menjadi harapan, semangat, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung yaitu menciptakan peradilan yang agung” kata Didik, usai pertemuan Tim Komisi III dalam kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Trimedya Panjaitan, dengan jajaran 4 lingkup peradilan se D.I. Yogyakarta, di



Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto

Pengadilan Tinggi DIY, Selasa (2/8).

Dalam Rapat tersebut, Komisi III mendengar kendala-kendala yang dihadapi dalam proses peradilan di DIY ini. Selain itu, menyerap aspirasi dari para hakim terkait pembahasan substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas dalam Panitia Kerja KUHP di Komisi III. Tim Komisi III juga mendengarkan aspirasi para hakim dalam ekspektasi

ke depan mengenai hakim melalui pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim.

Menurut Didik yang juga Sekretaris fraksi Partai Demokrat ini, Komisi III juga mendorong agar para hakim ini jangan berkontribusi terkait dengan persepsi publik terkait lahirnya mafia peradilan.

"Untuk itu, perbaikan-perbaikan itulah yang kita jalankan dengan harapan betul-betul lembaga peradilan ini bisa mempresentasikan lahirnya sebuah keadilan yang materiil terhadap pencari keadilan khususnya masyarakat

kecil," tuturnya.

Dia bersyukur dan menaruh apresiasi, Alhamdulillah saat sekarang manajerial penanganan kasus di DIY sudah transparan, terbuka dan terukur, serta masyarakat bisa berpartisipasi dengan mengakses setiap saat dengan teknologi web dan perangkat elektronik lainnya.

Terkait kesejahteraan hakim, juga menjadi perhatian Komisi III, tapi perlu disadari bahwa dalam pemerintahan SBY 10 tahun yang lalu, kesejahteraan hakim telah mendapatkan peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan informasi, bahwa gaji hakim terkecil Rp.10 juta dan terbesar di atas Rp.30 juta. Menurutnya, dalam konteks gaji sudah lebih bagus dibanding masa lalu namun memang beberapa tunjangan yang sudah menjadi amanah UU, Pemerintah sekarang belum memberikan hak itu kepada hakim.

"Inilah yang akan kita dorong dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk segera merealisasikan yang telah diamanahkan dalam UU," tegas Didik Mukrianto, politisi dari Dapil Jawa Timur IX. ■

(Ayu) Foto: Ayu/mr

## Bertemu Komisi III DPR RI, Mary Jane Titip Surat Untuk Presiden

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta, Selasa (2/8) diwarnai suasana haru. Terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso berkesempatan bertemu dengan Komisi yang membidangi hukum ini. Mary menitipkan surat kepada Komisi III untuk disampaikan untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

**W**akil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menjelaskan Kunjungan Kerja ini rutin dalam masa reses selalu Lapas. Selain itu, juga ingin memantau pencegahan peredaran narkoba di Lapas.

Menurut informasi yang didapat, Provinsi DIY cukup baik, dari 6 Lapas, hanya 2% kelebihan kapasitas, serta hanya ada 3 yang masih status kuning yang artinya tidak ada peredaran narkoba tapi handphone masih ada.

"Kita ingin mengetahui sejauh mana over kapasitasnya, "Lapas ini jangan sampai menjadi pusat peredaran narkoba serta teroris," jelasnya.

Yang menarik dari kunjungan ke Lapas ini, Komisi III dapat bertemu dengan 3 terpidana mati, salah satu yang paling populer MaryJane. Mary Jane menyampaikan surat kepada Komisi III, untuk disampaikan kepada Presiden. Tri Medya Panjaitan menerangkan bahwa nantinya surat ini akan segera diserahkan pada



Tim Kunker Komisi III DPR RI bertemu dengan terpidana mati asal Filipina Mary Jane

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Beliau (Mary Jane) minta keadilan supaya bisa dibebaskan dari hukuman mati. Sesampainya di Jakarta, Saya akan meminta waktu untuk ketemu dengan Pak Pramono Anung, untuk

menyerahkan surat Mary Jane ke Presiden Joko Widodo," tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini.

Tentunya, lanjut Trimedya, Presiden Jokowi akan meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. ■

(asi) foto: Agung/mr

# Pembenahan Infrastruktur Kesehatan Papua Barat Menjadi Prioritas Utama

Infrastruktur kesehatan di Papua Barat harus menjadi prioritas utama dalam anggaran kesehatan tahun mendatang, demikian disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Sorong, Kadis Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Rabu (3/8).

**P**olitisi Demokrat ini menilai masalah infrastruktur kesehatan terutama rumah sakit di Papua Barat masih kurang dan perlu mendapat perhatian. Apalagi penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah.

"Memang anggaran kesehatan ada di Komisi IX, namun kami tetap perlu mendalami sehingga nanti kami lihat mana yang akan menjadi skala prioritas tahun 2017," urai Dede Yusuf di Kantor Walikota Sorong.

Dirinya juga menemukan tumpang tindihnya data base PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan dengan Jamkesda, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, masih banyak penerima dana yang tidak sesuai peruntukannya, masih banyak penerima hak yang tidak mendapatkan haknya. Artinya data

base yang dibangun Kementerian Sosial masih tidak sesuai dengan kenyataan dan ini menjadi catatan penting bagi Komisi IX DPR RI.

"Ke depan kita akan membuat kesepakatan bersama antara BPJS dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Jamkesda. Karena ada slot Jamkesda yang disediakan Pemda tapi yang menggunakan belum tentu orang miskin," ungkap Dede Yusuf.

Selain itu Sumber Daya Manusia, yaitu dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya juga masih kekurangan. Hanya wilayah Teluk Bintuni yang mau mengalokasikan "uang duduk" untuk para dokter yang mau datang ke sini. Perlu diperbanyak

beasiswa-beasiswa sekolah kedokteran atau tenaga kesehatan bagi warga Papua untuk nantinya mereka bisa kembali mengabdikan daerahnya sendiri," pungkas Dede Yusuf. ■



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi



Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati

## Okky Asokawati ; Merek Makanan 'Bikini' Belum Kantongi Izin

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati menyesalkan atas produksi dan penjualan cemilan dengan merek dagang 'Bikini'(bihun kekinian) apalagi dengan gambar serta *tagline* produk yang tidak tepat.

## Sekjen DPR RI Apresiasi Organisasi Pemuda Yang Bangun Kemandirian

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mengapresiasi sikap para pemuda Indonesia yang tergabung dalam suatu organisasi, namun tidak mengabaikan rasa untuk membangun kemandirian bagi dirinya sendiri. Hal ini diutarakannya usai mendampingi Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).

“ Kita sangat mengapresiasi sikap anak-anak muda dalam berorganisasi, namun harus diimbangi juga dengan sikap yang ekstra mandiri, seperti yang dilakukan oleh para pemuda yang tergabung dalam DPP Ikatan Pelajar Muhammadiyah. S e l a i n berorganisasi, mereka j u g a memiliki kegiatan y a n g sifatnya bisnis,



*Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany*

sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri," tutur Win, sapaan akrab Winantuningtyas Titi. Ia juga mengatakan, terkait kegiatan menerima kunjungan para pemuda dari berbagai elemen dan organisasi untuk menyampaikan aspirasi a t a u s e k e d a r bersilaturahmi dan meminta saran dari Pimpinan atau anggota Dewan, hal itu juga merupakan bagian dari tugas DPR RI

sebagai wakil rakyat dalam membangun atmosfer demokrasi bagi para pemuda sebagai penerus bangsa.

"Kita ikut mendorong semangat mereka, seperti yang dilakukan oleh DPP Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. Dimana mereka juga punya kegiatan dan program-program pengembangan pendidikan dan pembinaan karakter, terutama pada sekolah-sekolah Muhammadiyah," ucapnya.

Adanya kesadaran sikap seperti itu merupakan hal yang sangat baik, oleh karena itu Setjen DPR RI mendukung berbagai organisasi pemuda yang berbuat untuk bangsa, tetapi dia juga membangun kemandiriannya. ■

(dep) Foto: Iyadati

**M**enurut Okky, kreativitas semestinya tetap dilandasi norma dan aturan yang berlaku. Merek unik mestinya tidak jorok. "Bisnis strat-up (rintisan) yang belakangan menjadi tren di Indonesia semestinya juga tetap memperhatikan soal norma dan aturan main sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalgi diketahui, merek dangan 'Bikini' belum mengantongi izin dan instansi terkait, "kata Okky melalui pers rilis, Jumat (5/8).

Legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, mencuatnya polemik cemilan 'Bikini' ini menjadi peringatan untuk pemerintah agar mengedukasi lebih intensif kepada pelaku kreatif di berbagai lini usaha.

Menurutnya, seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf),

BPOM dan pemerintah daerah (Pemda) agar senantiasa bersinegri memberikan pembinaan terhadap kelompok-kelompok keratif.

"Kreativitas anak negeri harus didorong untuk maju, namun tetap mengemban misi edukasi kepada publik," tegasnya.

Lebih lanjut menurut Okky, BPOM sebagai otoritas yang bertanggungjawab terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus meningkatkan sensitivitasnya terhadap produk yang beredar baik di pasar offline maupun pasar online.

"Di tengah pesatnya bisnis online seperti saat ini, semestinya pengawaasn BPOM jauh lebih ditingkaykandan menerpkan terobosan-terobosan signifikan," pungkasnya. ■

(rmm.mp), foto: jika mugabul.br

## Komisi VIII DPR RI Serap Aspirasi ke Kalteng

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketuaanya M Ali Taher melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan ini langsung disambut oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail di Aula Eka Hapakat. Palangkaraya, Senin (1/8).

Tujuan kunker dimaksudkan untuk menyerap aspirasi terkait bidang tugas Komisi VIII, karena itu ada beberapa hal yang ingin diketahui sejauh mana program kegiatan yang dilakukan Pemprov Kalteng pada bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak serta penanggulangan bencana.

"Oleh karena itu, kami berharap dalam pertemuan ini, Bapak Wakil Gubernur dan jajarannya dapat

P2TP2A di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan kekerasan lainnya dilakukan melalui sosialisasi hingga sampai tingkat RT. " Berbagai upaya penanganan dan pelayanan sesuai dengan operasional di P2TP2A. Kami terus berupaya menekan terjadi kekerasan ini," katanya.

Pemprov Kalteng juga terus

Tapi kita dalam menjalankan program ini terkendala faktor geografis dan sebaran KSN yang kurang merata," jelasnya.

Dia mengakui dalam menjalankan program baik bidang keagamaan, sosial dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemda sudah melakukan berbagai upaya. Namun, segala upaya yang dijalankan tentu tidak lepas dari kendala.

"Oleh sebab itu saya mengharapkan



Tim Kunker Komisi VIII memberikan cenderamata kepada Wagub Kalteng

memberikan penjelasan yang rinci terkait dengan hal-hal tersebut. Dengan harapan mampu menyerap aspirasi yang disampaikan," kata M Ali Taher.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng Habib Siad Ismail menyampaikan, Pemprov Kalteng dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

mengembangkan berbagai program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dimulai sejak 2010 lalu. Melalui program ini telah diberikan stimulan atau bantuan bagi masyarakat miskin. Hingga sekarang jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSN) penerima manfaat sudah mencapai 18 ribu lebih.

"Sementara dana yang dikururkan kurang lebih Rp 20 Miliar per tahun.

melalui kunjungan ini sekiranya DPR RI khususnya Komisi VIII dapat membantu mencari solusi atas segala permasalahan tersebut," katanya lagi.

Pada kesempatan ini, Komisi VIII DPR RI-RI juga menyerahkan bantuan senilai Rp 10 Miliar untuk pembangunan keagamaan di Kalteng. Selain itu ada pula bantuan berupa satu unit mobil untuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kalteng. ■



*Tim Kunker Komisi X DPR RI mengunjungi beberapa sekolah di Kupang*

## DPR RI Himbau Kemendikbud Bantu Sekolah di Kupang

Anggota Komisi X DPR RI Jefirston Riwu Kore menghimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk segera membantu dan membenahi sekolah-sekolah di Kota Kupang khususnya dan Nusa Tenggara Timur (NTT) umumnya.

“ Kami menghimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membantu atau membenahi sekolah-sekolah baik langsung ataupun melalui pemerintah kota. Kami mengharapkan bahwa sekolah ini bisa dibenahi lebih baik lagi, sehingga anak-anak di Kota Kupang bisa lebih cerdas, lebih pintar dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain,” papar politisi dari Daerah Pemilihan NTT ini disela-sela mengunjungi beberapa sekolah di Kupang bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi X, di Kupang, NTT, beberapa hari lalu.

Ia menyatakan, bahwa sekolah-sekolah yang dikunjungi Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefki Harsya tersebut adalah keadaan riil di Kota Kupang.

"Bisa dibayangkan sekolah yang sudah berumur 74 tahun keadaannya seperti itu. Ruang belajar tidak memadai, perpustakaan tidak ada, laboratorium tidak ada, pagar tidak ada. Lalu apa yang kita harapkan dari keadaan seperti itu," tukasnya.

Menurut Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini, gambaran tersebut merupakan gambaran umum sekolah di Kota Kupang. Banyak sekolah yang sama seperti itu, banyak yang lebih parah juga, tapi ada juga yang sedikit lebih baik dari SDN Inpres

Bakunase atau SD Negeri Patukuo yang dikunjungi Komisi X DPR RI.

"SD Patukuo itu juga sangat jauh, tidak ada air. Jangankan air, fasilitas-fasilitas lain juga tidak ada. Yang baru diberikan baru fasilitas kelas, itu pun sangat kurang memadai. Bukan itu saja, guru-guru pun hanya ada guru-guru honor saja, yang digaji Rp 200.000,- per tiga bulan. Itulah keadaan yang sangat memprihatinkan," imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Jefri demikian sapaan akrabnya, ia mengajak Anggota Komisi X DPR RI ke Kupang NTT untuk melihat keadaan yang nyata. Ia mengharapkan, melalui Anggota Komisi X DPR RI bisa mengajak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih memberikan dana kepada NTT Lewat Dana Akselerasi khusus yang sebagaimana pada masa Bapak M. Nuh Menteri Pendidikannya bisa diberikan kepada NTT.

SDN Inpres Bakunase di Kota Kupang usianya sudah 74 tahun kondisinya sangat memprihatinkan. Jumlah ruang belajar tidak mencukupi dengan jumlah siswa yang mendaftar, padahal sekolah itu berada di tengah kota. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terbaik di Kupang. ■

*(as)/parasusiatif/ra.*

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
@dpr\_ri DPR RI @DPR\_RI DPR RI



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima audiensi dari Paguyuban Sundawani Wirabuana perihal program musyawarah jawara yang akan dilaksanakan paguyuban tersebut, Kamis (11/8) Foto: Runi



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua DPD RI dan pengamat ekonomi dari INDEF dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema "Demokrasi Pajak dan RAPBN 2017", Kamis (11/8) Foto: Andri



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat didampingi Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany dan Kepala Biro Persidangan MPR RI dalam acara Cerdas Cermat 4 Pilar yang dihadiri oleh seluruh siswa SMA teladan Indonesia dari 34 provinsi, Rabu (10/8). Foto: Kresno

